

STRATEGI MUHAMMADIYAH MEMBANGUN MASYARAKAT MASA DEPAN: REFLEKSI HISTORIS- KRITIS PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:

Mukh Nursikin

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: ayahnursikin@yahoo.com

Abstract

The progress of a nation depends on education. There is no developed nation without going through the educational ladder. Therefore, the challenge for developing countries such as Indonesia is how to make education a cultural strategy towards the progress of the nation. Moreover, if a country is rich in natural resources and also have qualified human resources major, then the country will certainly experience a significant leap of progress. Muhammadiyah as the strength of the nation and laying the foundations participating countries, since the beginning of his birth to take part among others in the education movement. There are several strategy in Muhammadiyah to build future society, (1) Strategy Transformation of Education because education is the process of making man as a human being who understands-nobility. (2) Strategy Moral law legal moral awareness needs to be the cornerstone of our future life. (3) Strategy Implementation of national unity. This principle reflects the character of the Indonesian nation to unite (4) Strategy social system-based society, this system departs from the recognition that anyone has the right in the field and the level of authority of each (5) constructs the basic economic strategy. Muhammadiyah demanded commitment and responsibility in implementing the strategy of building a future society to revitalize the Muhammadiyah education in order to become a strategic institution to enlighten the people and nation.

Keyword: *Strategy of Muhammadiyah, Future of Society, National Education*

Pendahuluan

Refleksi ini berangkat dari akar budaya dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dengan terjadinya globalisasi, cita-cita ideal “*warga Negara*” yang perlu diperluas menjadi “*warga dunia*” yang baik dan manusia yang baik, sehingga nilai-nilai moral pancasila perlu pula berintegrasi dengan nilai-nilai moral universal. Pertumbuhan masyarakat maju melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri. Hal ini didorong oleh sifat fitri manusia yang membutuhkan pengakuan (*recognition*) atas kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.¹

Semakin besar kompleksitas masyarakat akibat pembangunan dan globalisasi semakin kuat hasrat memperoleh pengakuan terhadap kehadiran diri sebagai anggota masyarakat. Apabila masyarakat diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengaktualisasikan dirinya dalam mewujudkan aspirasinya secara mandiri, maka timbullah kekuatan besar dalam masyarakat untuk membangun. Karena itu, kebebasan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dan mewujudkan aspirasinya merupakan prasarat pokok bagi perkembangan masyarakat maju.

Ketika menilik filsafat pendidikan perenialisme yang berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya dan filsafat pendidikan progresif, yang terpusat pada pengembangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik, perlu disempurnakan dengan filsafat pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan budaya dan subjek,

¹ Omar Muhammad al-Taumy al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 130

sekaligus melihat subjek sebagai bagian dari warga “dunia”.² Pada saat yang sama, perubahan sosial perlu diantisipasi agar masyarakat tidak didikte oleh perubahan, tetapi mampu bertindak afirmatif, dengan demikian, misi pendidikan yang melandasi filsafat pendidikan Nasional adalah rekonstruksi sosial.³

Pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Manusia dilahirkan telah memiliki kemampuan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap. Manusia diciptakan Allah SWT dalam struktur yang paling sempurna diantara makhluk yang lain. Struktur manusia terdiri atas aspek jasmaniah dan aspek rohaniah/unsur filosofis dan unsur psikologis, dalam unsur-unsur ini manusia memiliki kecenderungan berkarya yang disebut potensialitas,⁴ yang dalam Islam disebut *fitrah*.

Kemajuan suatu bangsa tergantung pada pendidikannya. Tidak ada bangsa yang maju tanpa melalui tangga pendidikan. Banyak negara maju seperti Jepang yang tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya raya, tetapi karena memiliki modal sumberdaya manusia yang unggul, akhirnya menjadi negara modern yang maju. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi menjadi kekuatan Jepang melampaui negara-negara lainnya yang hanya

² Algar, Hamid, Murtadha Muthahari, *Fundamentalism of Islamic Thought God, Man an Universe*, (Berkeley: Mizan, 1985). hlm. 124.

³ Titus, Horald H. el.al, *Living Issues in Philosophy*, Alih Bahasa, H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 23.

⁴ Potensialitas, *potensiality* (Inggris) dari Latin *potensia*, diturunkan dari *potens* yang berarti “berkuasa”, “bertenaga” dalam segi tertentu, “berkemampuan” jenis tertentu. Istilah Latin terjemahan dari Yunani *dynamis*, yang digunakan Aristoteles sebagai nama untuk faktor yang berkolerasi dengan aktualisasi dalam analisis perubahan. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 874.

mengandalkan sumberdaya alam. Apalagi jika suatu negara itu kaya sumberdaya alamnya sekaligus memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas utama, maka negara tersebut tentu akan mengalami lompatan kemajuan yang signifikan. Karenanya, tantangan bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia ialah, bagaimana menjadikan pendidikan sebagai strategi kebudayaan menuju kemajuan bangsa.⁵

Dalam Tanfidz Keputusan Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah, yakni pada Bab II, terdapat penjelasan tentang Rumusan Filsafat Pendidikan Muhammadiyah. Beberapa poin dari keputusan tersebut. *Pertama*, hakikat pendidikan dalam pandangan Muhammadiyah. Terdapat pernyataan; “Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah SwT sebagai Rabb dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Dengan kesadaran spiritual makrifat (iman/tauhid) dan penguasaan IPTEKS, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama manusia yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarkan kemakmuran, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan dalam rangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang

⁵ Fasli Jalal, Dedi supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2008.

mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik”⁶

Muhammadiyah sebagai kekuatan bangsa dan ikut meletakkan fondasi negara, sejak awal kelahirannya berkiprah antara lain dalam gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan Muhammadiyah berkarakter khas, yakni sistem pendidikan Islam modern yang berkemajuan. Melalui pendidikan Muhammadiyah bergerak tak kenal lelah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, ketika Muhammadiyah memasuki abad kedua, seluruh institusi pelaksana pendidikan di lingkungan Persyarikatan dituntut komitmen dan tanggung jawabnya untuk merevitalisasi pendidikan Muhammadiyah agar menjadi pranata strategik untuk mencerahkan umat dan bangsa. Oleh karena itu penulis akan menulis dalam makalah ini tentang strategi Muhammadiyah membangun masyarakat masa depan: refleksi historis-kritis pendidikan nasional.

Refleksi Historis-Kritis Perjalanan Bangsa Indonesia

Hingga berakhirnya Orde Baru dan datangnya era reformasi, perjalanan sejarah bangsa Indonesia dapat dibagi ke dalam enam babak atau era sebagai berikut:

1. Era Kerajaan Lokal

Karakteristik dasar zaman ini adalah komitmen semua pihak, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, untuk menjadi patriotik yang membela kebenaran, membela kemandirian, dan membela

⁶ Illyas, Yunahar, Muhammad Azhar, *Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999). hlm. 112.

kebebasan terhadap penjajahan. Sebaliknya, rakyat melawan rajanya sendiri yang meninggalkan komitmen tersebut. Para kiai yang memiliki komitmen tersebut dipatuhi juga oleh para santri dan pengikutnya untuk melawan penjajah.⁷

2. Era Kolonial/VOC

Karakteristik dominan dari era ini adalah terjadinya eksploitasi segala sumber daya alam dan manusia oleh kaum kolonial. Misi yang dijalankan oleh penjajah adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari tanah jajahan, sementara semangat rakyat untuk melawan penjajah terus berlansung.⁸

3. Era Politis Etis

Pada era ini, tumbuh rasa etis-moral pada penjajah untuk tidak sepenuhnya mengeksploitasi masyarakat yang dijajah. Mereka mulai memperhatikan rakyat yang dijajahnya, tetapi mereka juga tetap ingin mendapatkan manfaat dari tanah jajahannya. Agar segala urusan daerah jajahan tidak harus selalu mereka tangani sendiri, maka diperlukan tenaga yang cukup terdidik dari kalangan pribumi untuk mengurus kesehatan kaum pribumi, menjalankan pemerintahan, menggarap tanah-tanah perkebunan, dan lain-lain. Untuk itu mereka membuka sekolah dokter Jawa, sekolah kerani, dan lain-lain. Mereka juga memperhatikan pendidikan kaum pribumi, terutama dari kaum priyai atau elit. Pada saat yang sama kaum pelajar yang telah memperoleh pendidikan bergabung dalam gerakan untuk membangun cita-cita Negara kebangsaan dengan mendirikan sekolahnya sendiri.

⁷ Ismail, SM, dan Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam Dan Demokrastisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). hlm. 213.

⁸ *Ibid*, hlm. 208

Pada sisi lain, semangat patriotisme dan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda terus berlangsung. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Perang Aceh yang baru berakhir pada tahun 1912.

Selama era pertama hingga ketiga tersebut, sejarah membuktikan bahwa patriotism untuk mempertahankan kemandirian dan menolak penjajahan terus berlangsung di banyak daerah di Indonesia. Dengan konsep keunggulan yang dikenal sekarang, konsep *national dignity* (harkat nasional) serta konsep *national pride* (martabat nasional), dapat disusun buku pelajaran sejarah Indonesia dari ketiga era tersebut yang dapat disebut sebagai “*era perlawanan terhadap penjajahan*”. Cakupannya merentang dari perang melawan Cina di era Kerajaan Lokal, perang Arafuru melawan Portugis, sampai dengan perang Aceh melawan Belanda pada era kolonialisme. Filosofinya adalah mempertahankan kemandiriannya, visinya adalah harkat dan martabat “bangsa”, dan misinya adalah mengembangkan kemampuan sendiri.⁹

4. Era Perjuangan Kemerdekaan (1908-1945)

Di kalangan para pelajar dan mahasiswa Indonesia berkesempatan memperoleh pendidikan dengan model barat, baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia pada awal abad ke-20, tumbuh kesadaran nasionalisme dan hasrat mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada kelompok ini, patriotism dan kehendak untuk bebas dari cengeraman penjajah semakin mengental.¹⁰ Di sisi lain, pada mayoritas penduduk terpelihara adat istiadat seperti *rembuk desa*, gotong royong, *saiyo sakato*, dan musyawarah untuk mufakat

⁹ Fasli Jalal, Dedi supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2008). hlm. 209.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 210.

(dalam makna aslinya), tetapi mayoritas dari mereka masih tunduk sepenuhnya pada penjajah setelah sekian lama dikondisikan untuk bersikap demikian.

Era 1908-1945 dapat disebut sebagai “*era perjuangan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional*”, yaitu memperjuangkan berdirinya Negara kebangsaan.¹¹ Hal ini berbeda dengan era sebelumnya yang dapat disebut sebagai era perlawanan bersenjata berkelanjutan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemandirian local. Predikat perjuangan politik yang diberikan kepada periode 1908-1945 didasari bukti-bukti sejarah berupa berkembangnya nasionalisme yang berangkat dari kesamaan komitmen patriotik untuk mempertahankan keandirian dan kebebasan. Patriotism yang tumbuh pada era 1908-1945 adalah patriotism yang mencairkan patriotism local pada era sebelumnya. Mulai 1908, dikalangan rakyat Indonesia yang terdiri atas beribu etni dan beribu bahasa daerah tumbuh persaan yang sama sebagai pribumi-pribumi yang terjajah. Mereka bercita-cita untuk bersatu guna mengusir penjajah, kemudian mendirikan sebuah Negara kebangsaan. Cita-cita ini mengalahkan sentiment kedaerahan *Jong Sumatera, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes*, dan lain-lain.¹²

Buku lain yang menggambarkan besarnya semangat nasionalisme adalah kesediaan pengguna bahasa lain, tertama bahasa jawa yang merupakan mayoritas (dengan sekitar 30 juta penutur pada tahun 1928) untuk tidak menuntut bahasanya menjadi bahasa nasional,

¹¹ Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES 1987) hlm. 200.

¹² *Ibid*, hlm, 132.

mereka bersedia menerima bahasa Melayu-Riau yang berasal dari etnik minoritas untuk menjadi bahasa nasional, padahal pada tahun 1928 (saat Sumpah Pemuda) bahasa itu hanya digunakan oleh sekitar 30 ribu penduduk Riau, namun telah menjadi bahasa komunikasi dan administrasi di antara pemuka masyarakat.¹³

5. Era Awal Kemerdekaan

Kesamaan komitmen patriotic untuk mempertahankan kemandirian dan kebebasan telah menumbuhkan kepercayaan daerah-daerah pusat untuk mengisi kemerdekaan, pada awal kemerdekaan, kepemimpinan nasional diserahkan kebijakan pemimpin nasional untuk menyelamatkan persatuan nasional. Pasukan-pasukan bersenjata tetap patuh kepada keputusan-keputusan politik Soekarno-Hatta. Sesaat sesudah proklamasi, presiden Soekarno menyatakan cita-citanya tentang Negara dengan satu partai tunggal, tetapi hal ini ditentang oleh wakil presiden dan banyak pemimpin. Apa yang kemudian adalah system multi partai dengan berkembangnya banyak partai politik. Akan tetapi, dengan perbedaan pandangan ini, kepemimpinan nasional tidak pecah. Pada perkembangan selanjutnya, kepatuhan yang dilandasi kepercayaan kepada pimpinan nasional telah dikhianati oleh sekelompok elit pimpinan nasional. Mereka mulai membangun koalisi *vested*, yaitu koalisi untuk bersekongkol mempertahankan kekuasaan dan selanjutnya menyalahgunakan kekuasaan itu untuk mengembangkan koalisi Nasakom dan koalisi

¹³ *Ibid*, hlm.145.

politik kekiri-kirian, yang memancing PKI dan simpatisannya untuk menggerakkan kudeta.¹⁴

6. Era Orde Baru

Koalisi *vested* mengembangkan lebih lanjut kepatuhan patrimonial ke daerah-daerah. Pimpinan-pimpinan di daerah dibawah serta untuk berkoalisi dengan iming-iming berbagai fasilitas agar mereka patuh kepada pimpinan pusat.¹⁵ Cara demikian menghapus sikap kritis di kalangan pimpinan daerah, dan bersama dengan pemerintah pusat mereka berkoalisi memandulkan kemampuan rakyat dalam merealisasikan hak-hak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam sector ekonomi, ekonomi rakyat mati perlahan-lahan digantikan ekonomi konglomerat yang lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dan asing. Kebijakan pertanian yang semestinya mengembangkan kemampuan produksi terbunuh dengan kebijakan impor kedelai dan gula, misalnya. Impor cengkeh memang diatasi dengan penanaman cengkeh sendiri, tetapi akhirnya juga mematikan keberdayaan rakyat karena sector ini didominasi oleh konglomerat. Pada babak akhir era ini, terjadi krisis ekonomi yang kemudian melahirkan gerakan reformasi pada 1998.

Masyarakat Masa Transisi

Masyarakat Indonesia pada masa transisi adalah masyarakat yang menerima ekses dan kesalahan-kesalahan masa sebelumnya.

¹⁴ Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES 1987) hlm. 270.

¹⁵ Fasli Jalal, Dedi supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2008) hlm. 231.

Masyarakat ini menyadari perlunya ada reformasi atau perombakan total dalam kehidupan bangsa.

Tanpa bermaksud untuk mengabaikan isu-isu lainnya, ada empat isu utama yang dijadikan fokus telaah ini, yaitu kesadaran moral-hukum, kesadaran multicultural, kesadaran otonomi daerah, dan kesadaran kreatif-produktif. Keempatnya itu akan menyangkut kesadaran hukum, budaya, politik, dan ekonomi. Moral hukum yang semestinya menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa sungkan oleh sebagian oknum telah diputarbalikkan, sehingga yang benar direkayasa menjadi salah, dan yang salah direkayasa menjadi benar. Masalahnya adalah bagaimana kesadaran moral hukum itu dapat ditumbuhkan kembali, lebih-lebih bagi membangun masa depan bangsa ini. Kita telah memiliki motto Bhineka Tunggal Ika yang lahir pada awal kemerdekaan suatu wawasan politik budaya yang mendahului zamannya. (Hal ini kemudian diperkaya dengan konsep masyarakat multicultural yang diadopsi oleh banyak Negara maju mulai pertengahan tahun 1970-an). Kesalahan yang terjadi di masa lampau adalah implementasi motto Bhineka Tunggal Ika bukannya ditujukan untuk mempererat persatuan nasional, melainkan malah lebih menumbuhkan eksklusivisme, “politik belah-bambu” (satu diangkat satu diinjak), dan kecemburuan sosial.¹⁶

Akibat koalisi *vested* yang disuburkan dengan model kepemimpinan patrimonial adalah terjadinya ketidakadilan yang dirasakan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, yang kemudian melahirkan tuntutan akan keadilan dimana-mana. Komitmen patriotic untuk mandiri dan bebas yang berkembang di

¹⁶ Fasli jalal, *Reformasi Pendidikan...*, hlm. 345.

masa lalu telah dikhianati oleh koalisi *vested* di tingkat pusat. Kondisi itu menumbuhkan ketidakpercayaan daerah kepada (pemimpin) pusat yang kemudian menumbuhkan tuntutan otonomi daerah, dan malahan beberapa daerah menuntut kemerdekaan.

Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat dikembangkan menjadi otonomi dengan gerak *sentripetal* (menyatu berpadu dalam orientasi persatuan bangsa) bukan menjadi otonomi dengan gerak *sentrifugal* (menjauh dari orientasi persatuan nasional). Namun bila dicermati, unsure-unsur daerah yang menjadi bagian dari koalisi *vested* pun masih bertahan, sehingga perlu dicermati apakah otonomi daerah yang sekarang mulai dilaksanakan tidak lantas terjebak pada koalisi baru, yaitu koalisi *status quo*, dimana pimpinan yang reformis terpaksa meminta bantuan kepada pemimpin lama yang sudah “berpengalaman”, tetapi *vested* suatu hal yang akan menghasilkan koalisi *status quo* di daerah.

Dalam bidang ekonomi, percepatan pembangunan ekonomi telah membuat kita mengabaikan kekuatan dasar ekonomi. Kekuatan dasar tersebut telah tergusur oleh prinsip efisiensi yang tidak tepat, yaitu mengimpor produk pertanian, termasuk produk pertanian untuk bahan baku industry pertanian, produk industri dasar dan induksi berat, karena cara ini dinilai lebih menguntungkan. Masalah kita sekarang adalah bagaimana kekuatan dasar ekonomi dapat dibangkitkan kembali melalui pemberdayaan produksi bahan baku dan bahan dasar hasil pertanian, pengembangan industry dasar yang memproduksi bahan dasar industry, dan menghidupkan ekonomi rakyat.

Masyarakat Madani

1. Konstruksi Sistemik Masyarakat Masa Depan

Perubahan masyarakat harus dipahami secara sistemik dengan mengkaji secara tajam perubahan aspek-aspek struktural, kultural, dan proses-proses sosialnya. Perubahan struktural yang paling terasa adalah perubahan yang terjadi atas tatanan kekuasaan, misalnya perubahan dari pola masyarakat colonial menjadi neocolonial, dari feodal ke neofeodal, dari otoriter menuju ke model masyarakat mengenai segala sesuatu yang dipandang baik dan benar beserta produk-produk budaya yang menyertainya.¹⁷ Perubahan kultural membutuhkan waktu lebih lama bila dibandingkan perubahan struktural. Perubahan proses sosial dapat terjadi semata-mata karena kondisi struktural dan kultural, dan dapat pula terjadi karena pengaruh yang datang dari faktor-faktor eksternal.

Kondisi seimbang antar sistem sosial akan menimbulkan kondisi stabil, tetapi juga sekaligus dapat menjadi kondisi static-stagnan. Dalam era perubahan yang sangat cepat seperti sekarang ini, terjadinya perubahan pada satu subsistem dapat mendorong secara cepat perubahan pada subsistem lainnya. Ketidaksesuaian antara aspek kultural dengan aspek struktural, misalnya, cenderung menimbulkan potensi terjadinya proses-proses sosial yang menghendaki perubahan. Semakin besar ketidaksesuaiannya, berarti akan semakin besar pula tumbuhnya kekuatan yang menghendaki perubahan. Suatu struktur sosial yang tak kuasa lagi menanggung beban, atau tak dapat lagi

¹⁷ Ismail, SM, dan Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam Dan Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm 212.

mengakomodasikan tumbuhnya nilai-nilai baru dalam masyarakat, cepat atau lambat, harus mengalami perubahan.¹⁸

Dalam pada itu, kalau perubahan structural telah terjadi, perubahan cultural akan juga terjadi. Berbagai upaya untuk mengubah kultur harus dilakukan untuk mengisi struktur baru yang cocok. Kecocokan antara struktur dan kultur akan saling memperkuat dan menciptakan kondisi ekuilibrium. Sebaliknya adanya ketidaksesuaian antara struktur dan kultur akan membuat suatu system goyah karena struktur dan kultur saling menngoyahkan, melemahkan, atau bahkan dapat saling menghancurkan dan membawa masyarakat ke situasi kacau. Situasi anarkis akan terjadi akibat aturan yang ada dimaknai secara berbeda sesuai pengakuan struktur dan kultur yang berbeda.

Embrio perubahan cultural dapat dipercepat dengan perubahan structural, namun pada perubahan struktur sudah semakin nyata, masih diperlukan usaha keras untuk penajaman dan pemantapan kultur. Contohnya ialah aspirasi terbentuknya masyarakat demokratis sudah dapat mulai tumbuh pada waktu pemerintahan otoriter masih berkuasa, dan hal tersebut akan memacu terjadinya perubahan system pemerintahan yang demokratis. Namun setelah pemerintahan berganti, masih akan diperlukan upaya keras untuk memberikan isi yang jelas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Secara dinamis, proses ini akan berlangsung sampai dicapainya kelarasan antara struktur dan kultur dengan warna demokrasi. Periode ini oleh Kuntowijoyo (1997) disebut sebagai tahap menuju masyarakat etis.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tantang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 211.

Menurut Kuntowijoyo ada tiga tahapan perubahan masyarakat. Pertama, *tahap masyarakat ganda*, yakni ketika terpaksa ada pemilahan antara masyarakat madani (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*) atau antara masyarakat dengan Negara. Karena adanya pemilahan ini, maka dapat terjadi Negara tidak memberikan layanan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kedua, *tahap masyarakat tunggal*, yaitu ketika masyarakat madani sudah berhasil dibangun. Ketiga, tahap masyarakat etis (*ethical society*) yang merupakan tahap akhir dari perkembangan tersebut. Pendapat Kuntowijoyo ini dipengaruhi oleh teori Gramsci yang memang dengan sengaja dipakai sebagai titik masuk teori politik Islam ke teori politik Barat modern. Menurut teori ini, Negara adalah struktur, sedangkan masyarakat adalah suprastruktur. Kalau masyarakat terbentuk karena kesadaran, Negara terbentuk karena kepentingan.

Dalam kondisi keterpilahan tersebut masyarakat hanya dapat mengharapkan adanya *enlightened self-interest* dari pemegang kepentingan. Pada waktunya, Negara harus dapat membuktikan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan Negara juga berdasarkan kesadaran, bukan hanya kepentingan. Apabila pembuktian itu berhasil maka sampailah pada tahap kesadaran tunggal, yakni terbentuknya masyarakat madani dimana struktur dan suprastruktur telah menyatu. Masyarakat madani ini dapat dipertentang dengan masyarakat teokratis, dan dapat pula dipertentangkan dengan masyarakat otokratis. Masyarakat madani di Indonesia diterjemahkan sebagai masyarakat demokrasi, ditandai dengan tegaknya hukum dan moral hokum dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Di Indonesia, kesadaran tunggal atas kepentingan masyarakat perlu mengimplisitkan keragaman, atau dengan kata lain “kesadaran tunggal dalam kemajemukan”.¹⁹ Memang masyarakat madani dapat berupa masyarakat sekuler atau juga masyarakat etis. Dalam hal ini, konsep masyarakat etis yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo berharga sekali, yakni masyarakat yang dibentuk oleh kesadaran etis, bukan oleh kepentingan bendawi. Kesadaran etis ini pun mengimplikasikan keragaman nilai etis yang perlu dicari kompatibilitasnya dalam nilai-nilai universal dan nilai-nilai Pancasila.²⁰

2. Manajemen Perubahan

Dalam kaitannya dengan perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya, Kuntowijoyo mengemukakan tiga strategi. *Pertama*, strategi struktural untuk mengubah tahap keterpilahan Negara dan masyarakat menuju ke suatu tahap menyatunya masyarakat dan Negara. “masyarakat politik” tidak dengan sendirinya menjadi satu dengan “masyarakat madani”,²¹ tanpa terjadinya perubahan structural dalam bentuk, misalnya, pembentukan Majelis Perwakilan yang lebih representative, pemilahan kedudukan eksekutif dari yudikatif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Kedua, strategi kultural lebih menekankan terjadinya perubahan perilaku individual dan cara berfikir. Hal ini berbeda

¹⁹ Fasli Jalal, Dedi supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2008) hlm. 331.

²⁰ Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Trasformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009). hlm.234.

²¹ Tilaar, H.A.R *Menentukan Sikap Dalam Pembaharuan Pendidikan; Refleksi Masa Lalu dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008) hlm. 213.

dengan perubahan structural yang lebih menekankan perubahan perilaku kolektif dan struktur politik. Ketiga, strategi mobilitas sosial bersifat lebih alami, sesuai dengan perkembangan intelektualitas dan hati nurani manusia dan masyarakatnya, dan hal ini sangat cocok untuk menciptakan masyarakat etis. Pendukung masyarakat etis adalah mereka yang sekaligus memiliki pengetahuan cukup dan iman yang mantap. Diyakini bahwa dengan pendidikan, strategi mobilitas sosial dapat menghasilkan perubahan menuju masyarakat etis secara lebih sadar dan tepat.

Strategi Muhammadiyah Membangun Masyarakat Masa Depan

1. Strategi Transformasi Pendidikan

Pendidikan adalah proses *menjadikan manusia sebagai* insan yang berakal-budi mulia. Pendidikan akal budi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²²

Dalam pandangan Muhammadiyah, pendidikan merupakan upaya sadar penyiapan peluang bagi manusia untuk menguasai ipteks berbasis wahyu tekstual (qauliyah) dan wahyu natural (qauniyah: alam semesta), mengembangkan kemampuan pemanfaatan alam semesta, menyerap seluruh prinsip perubahan peradaban bagi

²² Undang- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2008) hlm. 121.

kesejahteraan seluruh umat manusia dalam bentangan masa depan sejarah (Tanfidz Mukhtar Ke-46 Th 2010). Dengan pandangan pendidikan yang substantif itu maka sesungguhnya pendidikan merupakan strategi kebudayaan dalam membangun insan yang utuh menuju terwujudnya kebudayaan dan peradaban yang mulia. Bagi bangsa Indonesia yang religius dan memiliki ideologi Pancasila, pendidikan harus terus diupayakan untuk menjadikan kebudayaan bangsa meraih kemajuan secara lahir dan batin.

Di sinilah pentingnya pendidikan diletakkan dalam perspektif kebudayaan bangsa menuju masa depan yang berkemajuan. Karena pendidikan mengasah akal-budi manusia. Manusia yang berakal-budi hidupnya akan berada dalam bingkai nilai-nilai utama yang mampu membedakan hal-hal yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, dan yang pantas dari yang tidak pantas. Dalam kehidupan kolektif ketika manusia terbangun akal-budinya yang luhur maka akan terbentuk keadaban masyarakat yang berbasis pada keluhuran akal-budi insani. maka itulah yang membentuk kebudayaan.²³ Manakala kebudayaan itu mencapai puncak kemajuan maka disebut sebagai peradaban. Dengan demikian pendidikan merupakan satu matarantai dengan kebudayaan dan peradaban bangsa.

Pendidikan sebagai faktor strategis pembangunan bangsa seyogyanya dikembalikan pada misinya yang kokoh, yaitu sebagai strategi kebudayaan untuk membentuk watak bangsa yang cerah-budi dan berperadaban. Pendidikan saat ini kurang berhasil dalam

²³ Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009). hlm.134.

menanamkan nilai benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas dalam sistem perilaku subjek didik, sehingga melahirkan generasi robot yang menguasai iptek tetapi gagap nilai moral.²⁴

2. Strategi Moral hukum

Kesadaran moral hukum perlu menjadi landasan kehidupan masa depan kita. Tegakkan hukum bukan sebatas secara yuridis benar, melainkan secara substansial benar dan adil. Kesalahan yang terjadi selama ini memang bukan kesalahan spesifik orde baru, melainkan kesalahan mendasar dari sistem hukum dan pandangan ilmu yang positivistic. Moral hukum positif yang diontologik di Negara yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan dan Keadilan perlu berlandaskan pada *moral human* yang ontologik serta *moral religious*.²⁵

3. Strategi Penerapan Bhineka Tunggal Ika (secara benar)

Prinsip ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia untuk bersatu. Dari segi ini, tuntutan otonomi atau tuntutan untuk merdeka dari daerah tertentu sesungguhnya bukan berasal dari karakter dasar bangsa Indonesia, melainkan karena kesalahan politik dalam menerapkan motto Bhineka Tunggal Ika. Pada era sebelumnya, penerjemahan prinsip tersebut lebih menekankan keseragaman (uniformatis) dengan mengabaikan perbedaan dan keragaman yang justru menjadi landasan dasar bangunan bangsa ini. Di pihak lain, pengakuan atas keberagaman namun dalam kesatuan dimarjinalkan yang kemudian menimbulkan frustrasi di daerah-daerah atau kelompok etnik.

²⁴ *Ibid*, hlm 211.

²⁵ Fasli jalal, *Reformasi Pendidikan*,... hlm. 213.

Pada era reformasi, kesalahan tersebut harus dikoreksi, sehingga prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan ide awalnya tatkala prinsip ini lahir di awal kemerdekaan. Dalam kerangka yang baru nanti keragaman tidak dikembangkan menjadi perbedaan untuk dipertajam yang membuat kita saling berjarak satu sama lainnya, melainkan menjadi kekayaan keragaman dalam persatuan, *unity in diversity* dan *diversity in unity*.²⁶ Keyakinan agama masing-masing diyakini dalam konteks menyadari adanya pluralism agama, memahami adanya keyakinan lain di luar agamanya.²⁷

4. Strategi sistem sosial berbasis masyarakat

Sistem ini berangkat dari pengakuan bahwa siapa pun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing. Anak, orang tua, kelompok-kelompok masyarakat, sekolah dan lain-lain masing-masing memiliki haknya. Dengan pengakuan tersebut, masyarakat ini sendirilah yang semestinya membuat kebijakan, dan walaupun pemerintah yang membuat kebijakan itu, maka kehendak masyarakat harus menjadi dasar utamanya. Dalam era reformasi ini, kebijakan publik dalam bidang apa pun harus didasarkan atas aspirasi masyarakat dan bersifat bottom up.²⁸

5. Strategi konstruk dasar ekonomi

Sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, dewasa ini Indonesia sedang menuju pada globalisasi ekonomi dengan menganut

²⁶ Ismail, SM, dan Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam Dan Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 311.

²⁷ Titus, Horald H. et.al, *Living Issues in Philosophy*, Alih Bahasa, H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hlm 213.

²⁸ Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial ...*, hlm 221.

prinsip-prinsip kompetisi, efisiensi, dan orientasi pasar bebas ditahun 2015 sudah dicanangkan masyarakat ekonomi asean (MEA) Meskipun globalisasi ekonomi tidak dapat dihindarkan, Indonesia dituntut untuk bijak dalam mengembangkan kebijakan ekonomi maronya, jangan sampai globalisasi menjadi perangkap bagi ekonomi nasional. Misalnya, Indonesia menjadi sangat tergantung kepada ekonomi global tanpa memiliki ketahanan dalam ekonomi nasionalnya.

Dari Negara lain ada pelajaran, misalnya, atas saran lembaga internasional dan pertimbangan pasar internasional, dua pertiga pertanian Meksiko dipacu untuk meningkatkan produksi jagung. Ketika harga jagung jatuh, maka ekonomi Negara itu ambruk. Untuk Kasus Indonesia, pada era Orde Baru usaha tradisional tahu-tempe menjadi berantakan karena kedelainya tergantung pada Negara lain.²⁹ Industri otomotif tidak pernah menjdai mandiri, karena para ekonom menghitung bahwa lebh murah mengimpor daripada memproduksi *spare parts* sendiri di dalam negeri. Maka ketika terjadi krisis ekonomi, industry otommotif ikut goncang. Dalam era Reformasi sekarang, konstruk dasar ekonomi harus dibangun kembali agar industry hulu pengolah hasil pertanian berperan baik, industri manufaktur didukung produksi industry dasar (*basic industry*), dan produk industry berat (*heavy industry*) dalam negeri.³⁰ Dengan demikian, industry cat dan farmasi, misalnya menggunakan bahan baku dari industry dasar dalam negeri, industry assembling mobil

²⁹ Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES 1999)

³⁰ Adioetoma, M.S, *Dampak krisis Ekonomi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Lembaga Demografi UI, 1999) hlm. 344.

menggunakan sebanyak mungkin komponen lokal produk industri berat dalam negeri.

Penutup

Pertumbuhan masyarakat maju melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri. Hal ini didorong oleh sifat fitri manusia yang membutuhkan pengakuan (*recognition*) atas kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan merupakan proses budaya, karena itu ia tumbuh dan berkembang dalam alur kebudayaan setiap masyarakat dan sering bersumber pada agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat sehingga kehadirannya mempunyai akar yang kuat pada budaya masyarakat.

Dalam kondisi ini, peningkatan SDM menjadi amat penting karena dengan bermacam-ragamnya adat istiadat dan budaya serta bahasa daerah, adakalanya merupakan kendala dalam upaya mempersatukan persepsi kebhinekaan tersebut. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan bukan meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, terbuka, bertanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Kondisi ini merupakan potensi dalam strategi menciptakan manusia kreatif-produktif, daya nalar yang berwawasan ke masa depan atau melahirkan manusia yang berdaya unggul.

Strategi Muhammadiyah Membangun Masyarakat Masa Depan, (1) Strategi Transformasi Pendidikan karena Pendidikan adalah proses *menjadikan manusia sebagai* insan yang berakal-budi mulia. (2) Strategi Moral hukum Kesadaran moral hukum perlu menjadi landasan kehidupan masa depan kita. (3) Strategi Penerapan Bhineka Tunggal Ika (secara benar) Prinsip ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia untuk bersatu (4) Strategi sistem sosial berbasis masyarakat, Sistem ini berangkat dari pengakuan bahwa siapa pun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-masing. (5) Strategi konstruk dasar ekonomi, Sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, dewasa ini Indonesia sedang menuju pada globalisasi ekonomi dengan menganut prinsip-prinsip kompetisi, efisiensi, dan orientasi pasar bebas.

Daftar Pustaka

- Al-‘Ainain, Ali Khalil Abu, *Falsafah Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Qur’an al karim*, Beirut: Dar al-fikr al-araby, 1980.
- Abduh, *al-A’mah al-Kamilah*, Beirut: al-Muassasah al-‘Arabiyah li al-Dirasat wa al-Nashr, 1987.
- Al-Attas, Syeh Muhammad al-Naquib, *Aims and Objektives of Islamic Education*, Jeddah: Kind Abdul Azizi University, 1979.
- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Abdullah M. Amin, *Studi Agama; Normativitas dan historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abbas, Hafid, *Reformasi Filosofis Pendidikan Islam*, dalam A. Syafi’i Ma’arif, *Islam dan Pengembangan Disiplin Ilmu Sebuah Transformasi Ilmu*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2003.

- Adioetoma, M.S, *Dampak krisis Ekonomi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Demografi UI, 1999.
- Ahwani, Ahmad Fuad, *Al-tarbiyah fi Al-Islam*, Kairo: Dar'al Ma'arif, 1980.
- Ali mukti, *Meninjau Kembali Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Ulama*, Jakarta: no. 2/Vol. IV/P3M, 1987.
- Al-Nahlawi, Abdurahman, *Ushul al-Tarbiyah al Islamiyah wa Asalabiha fi al Baiti wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al Munawir, Said Agil Husaein, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 1984.
- Athiyah, al-Abrasyi, Muhammad, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Mesir: Isa Albabi al Halabi wa Syirkahu, 1975.
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Algar, Hamid, Murtadha Muthahari, *Fundamentalsm of Islamic Thought God, Man an Universe*, Berkeley: Mizan, 1985.
- Bubacher, John. S, *Modern Philosaphy of Education*, Engelwood Company, New Jersey, 1962.
- Badaruddin, Kemas, *Filsafat Pendidikan Islam-Analisis Pemikiran Syeh Muhammad al-Naquib al-Attas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bloom, Bejamin S, *Taxonomy of Education Objektibes, the Classification of Aducational Goals Handbook I: Cognive Domain*, New York: David McKAY Company, INC, 1974.
- Buchori, Mochtar. *Ilmu Pendidikan dan Pratek Pendidikan dalam renungan*, Yogyakarta: Tiara wacana Kerjasama dengan IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994.

- Borgatta, Edgar F & Marie L, Borgatta, *Encyclopedia of Sociology*, Macmillan publishing Company, New York: 1984.
- Crow and Crow, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Creswell, John W, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approach*, Jakarta: KIK Press, 2003.
- Djaenuri, Ahmad, *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 2001.
- Dlofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Daniels, Harry, *An Introduction to Vygostky*, USA: Routledge, 2005.
- Fazlurahman, *Islam and Modernity*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Fasli Jalal, Dedi supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2008.
- Isyad, Juweli, *Pembaharuan Kembali Pendidikan Islam*, Jakarta: Yayasan Karsa Utama Mandiri dan PB Mathalul Anwar, 1998.
- Illyas, Yunahar, Muhammad Azhar, *Pendidikan Islam Perspektif al-Qur'an*, Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999.
- Ismail, SM, dan Abdul Mukti (ed.), *Pendidikan Islam Dan Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- _____, et.al, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: kerjasama fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 2002.
- Inkeles, Alex what is sociology: *An Introduction to The Disciplines and Profession Foundation of Modern Sociology series*, New Jersey: Englewood Cliffs, 1964.

- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES 1987.
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum*. Solo: Ramadhani, 1991.
- Undang- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Nana Syaodih S, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rosda Karya, 2001.
- Patton, Patricia, *EQ Keterampilan Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Media, 1997.
- Robert C. Bogdan, *Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Sutrisno, *Pendidikan Yang Menghidupkan*, cet ke-2, Yogyakarta: Kota Kembang, 2008.
- Thalib, Syamsul Bachri, *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empirik Aplikatif*, Jakarta: Purnada Media Grup, 2010.
- Tilaar, H.A.R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Trasformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- _____, *Menentukan Sikap Dalam Pembaharuan Pendidikan; Refleksi Masa Lalu dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- _____, *Paradigma Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Tyler, Ralp, *Basic Principles of Currilum and Intruction*, London: The University of Chicago Press, 1949.

Titus, Horald H. el.al, *Living Issues in Philosophy*, Alih Bahasa, H.M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.